



Antisipasi Kebocoran Pajak

Penerapan PHR "Online" Dipercepat

Gianyar (Bali Post) -

Dalam RAPBD Gianyar Tahun Anggaran 2016, pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp 448,142 miliar atau 26,77 persen dari total pendapatan daerah yang direncanakan Rp 1,674 triliun. Rancangan PAD tersebut meningkat Rp 77,462 miliar atau 20,90 persen dibandingkan PAD tahun 2015 yang sebesar Rp 370,679 persen. Guna mencapai target PAD, Pemkab Gianyar akan melakukan sejumlah upaya, salah satunya percepatan penerapan PHR *online*.

Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata di sidang paripurna DPRD Gianyar yang beragenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Senin (30/11) kemarin, mengungkapkan, PAD yang dirancang masih didominasi pada sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Guna mencapai target, pemungutan PHR harus dilakukan lebih efektif. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan

PHR *online* untuk mengurangi kebocoran dinilai sangat strategis.

Agung Bharata menyebut, pihaknya telah mengoptimalkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah melalui PHR *online*. Namun, penerapan sistem tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap. Program ini telah dirintis sejak beberapa tahun belakangan.

Dijelaskannya, Pemkab Gianyar bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam PHR *online* melalui pemasangan alat perekam transaksi atau *tapping box*. Sampai saat ini, *tapping box* yang telah terpasang baru seratus buah. Ke depan, khususnya pada tahun 2016, pemasangan *tapping box* akan dilanjutkan sebanyak 300 buah. "Dilanjutkan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebanyak 300 buah. Alat *tapping box* tersebar di masing-masing wajib pajak," katanya. Ditambahkannya, dalam mewujudkan PHR *online*

diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Maka dari itu dilakukan program diklat dan bimtek secara kontinu dengan BPD.

Di sisi lain, untuk pencapaian target pajak air tanah yang belum berdasarkan potensi, ke depan Pemkab Gianyar akan melakukan pendataan terhadap potensi wajib pajak air tanah. Pemanfaatan water meter dalam hal ini sangat diperlukan. Pemkab akan mengintensifkan pengawasan water meter yang belum terpasang dan belum berfungsi secara maksimal pada WP agar tidak terjadi penyimpangan dalam perhitungan pajak.

Demikian pula menyangkut penangan piutang daerah. Pemkab bakal melakukan konfirmasi dan validasi data piutang pajak dan retribusi. Selanjutnya juga dibentuk Tim Penagih Tunggakan Pajak dan Retribusi. Tim tersebut melibatkan unsur instansi terkait dan aparat penegak hukum. (kmb25)

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 9



APBD Badung 2016 Tembus Rp 4 Triliun ✓ DPRD Badung Tetapkan 4 Ranperda Jadi Perda

DPRD Badung, Senin (30/11) kemarin, berhasil menetapkan empat ranperda menjadi perda. Empat ranperda itu adalah Ranperda tentang APBD TA 2016, Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel, Ranperda tentang Keuangan Desa dan Ranperda tentang Penetapan Desa.

Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta, dan dihadiri Pj. Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka, seluruh anggota dewan dan pejabat Badung itu terungkap bahwa APBD Badung TA 2016 berhasil menembus angka Rp 4 triliun lebih, tepatnya 4.080.562.011.140. Melonjak dari rancangan awal APBD yang diajukan Pj. Bupati sebesar Rp 3,6 triliun.

Ketua Komisi III DPRD Badung Nyoman Satria yang membacakan laporan hasil pembahasan DPRD Badung, mengatakan bahwa dari hasil pembahasan DPRD dengan eksekutif telah disepakati postur RAPBD 2016 ditetapkan dengan perubahan, menjadi sebagai berikut: Pendapatan daerah Rp 3.771.209.828.733,46 (meningkat Rp 172.684.197.113,82), belanja daerah Rp 4.080.562.011.140,64 (meningkat Rp.444.154.251.251,00). Defisit Rp 309.352.182.407,18.

Pembiayaan daerah: untuk penerimaan Rp 518.999.307.188,46 (meningkat Rp 326.313.968.137,40), pengeluaran Rp 169.803.470.000,00 (meningkat Rp 15.000.000.000,00. Pembiayaan netto Rp 349.195.837.188,46 (men-



TANDA TANGANI - Wakil Ketua DPRD Badung Made Sunarta menandatangani surat keputusan DPRD dan berita acara Ranperda dalam sidang paripurna yang menetapkan empat Ranperda menjadi Perda.

ingkat Rp 311.313.968.137,40) dan Silpa Rp 39.843.654.781,28 (meningkat Rp 39.843.914.000,22). Dengan postur APBD tersebut, kata Satria, Ranperda tentang APBD Badung TA 2016 dapat disepakati untuk selanjutnya ditetapkan setelah dievaluasi oleh gubernur.

Untuk memastikan seluruh anggota dewan Badung sepatutnya dengan APBD tersebut, Sunarta yang memimpin sidang kembali menanyakan apakah RAPBD Badung dapat disepakati kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

Sementara itu, Pj. Bupati Harry Yudha Saka dalam sambutannya mengatakan APBD merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. "Kami menyampaikan terima kasih kepada

seluruh anggota DPRD Badung dan kepala SKPD karena sudah membahas RAPBD Badung dengan cermat dan lancar," ujarnya.

Ia juga menjelaskan peningkatan APBD dari rancangan awal Rp 3,6 triliun menjadi Rp 4 triliun diakibatkan oleh adanya tambahan dana sebesar Rp 444,1 miliar lebih yang bersumber dari DAU, DAK, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Peningkatan ini juga bersumber dari pengurangan atau pembatalan rencana kenaikan tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 90 miliar.

Dari total belanja daerah yang telah disepakati, belanja tidak langsung Rp 2,1 triliun lebih dan belanja langsung Rp 1,9 triliun lebih. "Dari porsi penerima manfaat, maka belanja publik 69,34% dan belanja aparatur hanya 30,66%," katanya. (ad1698)

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 4



Dewan Setuju Kenaikan TPP Rp 22 Miliar[✓]

Bangli (Bali Post) -

DPRD Kabupaten Bangli akhirnya menyetujui usulan kenaikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN). Hanya saja kenaikan TPP kali ini disertai dengan beberapa syarat. Selain meminta pejabat lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, dewan juga menarget agar Pemkab Bangli dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2016 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles didampingi Made Sudiasa, Dewa Gede Oka dan Wesnawa Gelgel saat ditemui di kantornya Senin (30/11) mengatakan, nilai kesejahteraan yang selama ini diterima pegawai di Bangli memang paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Oleh karenanya,

pihaknya di fraksi Demokrat serta fraksi PKPI dan Gerindra memutuskan untuk menyetujui usulan eksekutif mengenai kenaikan TPP.

Adapun nilai anggaran yang disetujui untuk perbaikan penghasilan pegawai yakni Rp 22 miliar. Kendati menyetujui, namun pihaknya mengaku tetap memberikan

beberapa syarat terhadap eksekutif. Dewan meminta kenaikan TPP harus dilakukan berkeadilan, dengan memperhatikan pegawai di bawahnya. Selain itu, dewan juga meminta agar setelah pendapatannya meningkat, para pejabat ASN di Bangli bisa meningkatkan kinerjanya. "Peningkatan kinerja ASN

bisa terukur dari peningkatan pelayanan publik dan harus mampu meraih opini WTP di tahun 2016 mendatang," kata Carles.

Namun demikian, jika setelah TPP dinaikkan kinerja mereka tetap juga tidak menunjukkan peningkatan, maka pihaknya akan mempertimbangkan kenaikan TPP di tahun berikutnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dewan akan memotong TPP para ASN di Bangli menjadi lebih rendah. "Kenaikan TPP ini akan mulai diterima Januari mendatang. Kita harapkan dengan kenaikan TPP

ini menjadi dorongan untuk ASN meningkatkan kinerja mereka," ujar Sudiasa.

Tak hanya kenaikan TPP, dalam APBD 2016 dewan juga mengaku menyetujui kenaikan honor GTT dan PTT ke angka sekitar Rp 1 juta. Mengingat beban kerja yang diemban tenaga GTT dan PPT yang hampir sama dengan PNS, dewan pun merencanakan akan terus menaikkan honor mereka hingga sesuai dengan upah minimum regional (UMR). "Setiap tahun kita akan upayakan naik hingga di tahun 2018 bisa sesuai UMR," imbuh Sudiasa. (kmb40)

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 8



DPRD Karangasem Sahkan APBD 2016 Pendapatan Rp 1,5 Triliun, Defisit Rp 44,5 Miliar

DPRD Karangasem pada sidang paripurna, Senin (30/11) kemarin, mengesahkan dua Ranperda menjadi Perda, yakni Perda APBD 2016 dan Perda Penyertaan Modal ke PDAM Karangasem. Dari nota keuangan APBD 2016, tercatat pendapatan daerah dirancang Rp 1,538 triliun lebih dan belanja daerah dirancang Rp 1,583 triliun lebih. Defisit mencapai Rp 44,5 miliar.

Defisit sebesar itu ditutupi dengan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu. Tahun lalu ada penerimaan pembiayaan Rp 73 miliar lebih, sementara pengeluaran pembiayaan Rp 28,5 miliar lebih.

Pada sidang paripurna pengesahan APBD 2016, juga disahkan Perda Penyertaan Modal sebesar Rp 4,5 miliar ke PDAM Karangasem. Dengan demikian, sampai kini penyertaan modal Pemkab ke Karangasem ke satu-satunya BUMD di Karangasem itu sudah mencapai Rp 28 miliar. Atas penambahan modal lagi cukup besar Rp 4,5 miliar, sejumlah fraksi di dewan minta agar manajemen PDAM memperluas cakupan pelayanan air bersih. Di samping itu, kualitas dan kapasitas atau kelancaran pasokan air diperbaiki, sehingga pelanggan tak kecewa akibat aliran air PDAM yang *kecrat-kecrit* di sejumlah wilayah.

Semua fraksi di DPRD Karangasem menyatakan setuju kedua

perda itu disahkan. Namun dengan berbagai catatan. Fraksi PDI-P minta dalam pelaksanaan APBD itu mengadopsi aspirasi rakyat dan hasil reses dewan. "Pemberian tunjangan perbaikan kinerja, mesti memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan serta proporsional," ujar Komang Mustika Jaya yang membacakan laporan hasil rapat gabungan komisi.

Fraksi NasDem minta satuan kerja (satker) yang membidangi pertanian memperbaiki jaringan irigasi yang rusak. Senada dengan NasDem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Gerindra minta dengan penyertaan modal

ke PDAM, anggaran dikelola dengan baik guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum ke masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Demokrat minta pembangunan infrastruktur dilaksanakan tepat waktu, tepat guna dan sesuai kebutuhan masyarakat. Fraksi yang beranggotakan lima orang ini juga minta anggaran ke pendidikan dan kesehatan ditingkatkan. "Pelayanan di RSUD Karangasem bagi pasien yang belum memiliki e-KTP agar tetap dilayani dengan maksimal," ujar anggota Dewan dari Fraksi Bhineka. (ad1694)



PENGESAHAN APBD - Pimpinan DPRD Karangasem dan Pejabat Bupati menandatangani pengesahan APBD 2016 Karangasem, Senin (30/11) kemarin.

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 4



Bali Post



Perubahan Perbup Bansos dan Hibah Bupati Akhirnya Tanda Tangani



SIDANG - Bupati Gianyar Agung Bharata (kiri) menyalami sejumlah anggota dewan usai sidang paripurna, Senin (30/11) kemarin. Dalam sidang paripurna tersebut, Agung Bharata menyampaikan bahwa pihaknya telah menandatangani perubahan Perbup tentang Dana Hibah dan Bansos. Bali Post/ded

hal 1

Edisi : Setara, 1 Desember 2015
Hal : 5



Sambungan

Gianyar (Bali Post) -

Bupati Gianyar A.A. Gde Agung Bharata mengubah kebijakannya terkait pencairan dana bansos dan hibah di APBD-P 2015. Agung Bharata akhirnya menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dana Hibah dan Bansos. Namun, perbup tersebut masih harus diverifikasi di provinsi. Pencairan dana bansos dan hibah di APBD-P 2015 pun kemungkinan besar tak bisa dilakukan tahun ini.

Dalam sidang paripurna DPRD Gianyar, Senin (30/11) kemarin, Agung Bharata yang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi menyatakan, dana bansos dan hibah pada APBD Perubahan 2015 akan direalisasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pihaknya telah menerbitkan perubahan perbup tentang dana hibah dan bansos. Saat ini, perubahan perbup itu dalam tahap klarifikasi di provinsi.

Pernyataan tersebut jelas bertolak belakang dengan kondisi sebelumnya. Bupati Agung Bharata sempat menandatangani perbup tentang dana bansos dan hibah khususnya bagi desa pakraman dan subak. Namun, perbup itu tak jadi diterbitkan dengan alasan agar tidak menimbulkan kesan pilih kasih dan bermasalah di kemudian hari.

Dikonfirmasi mengenai kebijakan yang diambil saat ini, Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayatra mengatakan, sebelumnya memang ada penundaan penerbitan perbup tentang pencairan dana hibah dan bansos tersebut. Namun setelah mencermati dinamika yang terjadi dan hasil koordinasi dengan pimpinan dewan, kejaksaan, Mendagri dan BPK, akhirnya perbup itu jadi diterbitkan. Kebijakan dalam pencairan dana bansos dan hibah di Gianyar semuanya mengacu pada

peraturan gubernur yang sudah berjalan.

Meski demikian, pihaknya mengatakan, pencairan dana bansos dan hibah di APBD-P 2015 sangat sulit dilakukan tahun ini. Pasalnya, perbup masih dalam tahap klarifikasi. Di sisi lain, rentang waktu yang tersisa tahun ini hanya tinggal hitungan hari.

Oleh karenanya, dana bansos dan hibah yang dipasang di APBD 2015 tetap bakal masuk silpa APBD 2016. Namun, anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk dicairkan tahun depan. "Semua anggaran masuk dalam silpa APBD 2016 dan akan dijadikan prioritas untuk dicairkan tahun 2016," katanya.

Sebelumnya, dibatalkannya penerbitan perbup tentang bansos dan hibah sempat menimbulkan polemik di pemerintahan Gianyar. Bahkan hal ini disebut-sebut menjadi pemicu kisruh sidang paripurna perdana pembahasan RAPBD 2016.

Masalah kepastian pencairan dana tersebut juga menjadi sorotan dalam sidang paripurna. Hampir seluruh fraksi di DPRD Gianyar mendesak bupati segera mencairkan dana hibah dan bansos yang merupakan hak masyarakat dalam APBD perubahan tahun 2015 dengan menerbitkan Perbup. Alasannya, di tingkat provinsi sudah ada pergub yang mengaturnya dan tidak mengalami kendala. (kmb25)

hal 2

Edisi : Selasa, 1 Desember 2015

Hal : 9